

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Keadaan Geografis

Karesidenan adalah pembagian wilayah administrasi yang terdiri dari beberapa kabupaten/kota di sebuah provinsi hingga tahun 1950an. Karesidenan Surakarta merupakan salah satu karesidenan yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Karesidenan Surakarta terdiri dari beberapa kabupaten/kota yang meliputi:

1. Kota Surakarta

Kota Surakarta adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Kota Surakarta terletak pada $110^{\circ}45'15''$ - $110^{\circ}45'35''$ bujur timur dan $70^{\circ}36''$ - $70^{\circ}56''$ lintang selatan dengan dataran rendah di ketinggian 105 m dpl dan di pusat kota 95 m dpl. Kota Surakarta memiliki luas $44,03 \text{ km}^2$ yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Karanganyar di sisi utara dan timur, pada sisi selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo, pada sisi barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Karanganyar. Secara administrasi, Kota Surakarta terbagi menjadi 5 kecamatan yang terdiri menjadi 51 kelurahan.

2. Kabupaten Klaten

Kabupaten Klaten secara geografis terletak di antara $110^{\circ}30'$ - $110^{\circ}45'$ bujur timur dan $7^{\circ}30'$ - $7^{\circ}45'$ lintang selatan. Wilayah Kabupaten Klaten

memiliki luas 655,6 km². Secara administrasi, wilayah Kabupaten Klaten terbagi menjadi 26 kecamatan yang terdiri dari 10 kelurahan dan 391 desa. Kabupaten Klaten berbatasan langsung dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sukoharjo di sisi utara, kemudian pada sisi selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul, pada sisi barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman, dan pada sisi timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo.

3. Kabupaten Boyolali

Kabupaten Boyolali merupakan salah satu wilayah eks Karesidenan Surakarta yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Boyolali terletak di antara 110° 22'–110° 50' bujur timur dan 7° 36' – 7° 71' lintang selatan. Luas wilayah Kabupaten Boyolali adalah 1.015,1 km². Secara topografi, wilayah Kabupaten Boyolali merupakan dataran rendah dengan pengunungan dan perbukitan yang berada pada ketinggian rata-rata 700 m dpl. Secara administrasi, wilayah Kabupaten Boyolali terbagi menjadi 19 kecamatan yang terdiri dari 267 desa. Kabupaten Boyolali berbatasan langsung dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang di sisi utara, pada sisi selatan berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian pada sisi timur berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar, Sragen dan Sukoharjo dan pada sisi barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang.

4. Kabupaten Sukoharjo

Kabupaten Sukoharjo terletak di antara $110^{\circ} 50'$ bujur timur dan $07^{\circ} 42'$ lintang selatan. Kabupaten Sukoharjo memiliki luas wilayah $466,6 \text{ km}^2$. Secara administrasi, wilayah Kabupaten Sukoharjo terbagi menjadi 12 kecamatan yang terdiri dari 167 desa/kelurahan. Kabupaten Sukoharjo berbatasan dengan Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar di sisi utara, pada sisi selatan berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Gunung Kidul, kemudian pada sisi timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Karanganyar dan pada sisi barat berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten.

5. Kabupaten Wonogiri

Secara astronomis Kabupaten Wonogiri terletak di antara $7^{\circ} 32' - 8^{\circ} 15'$ Lintang Selatan dan $110^{\circ} 41' - 111^{\circ} 18'$ Bujur Timur. Kabupaten Wonogiri memiliki luas wilayah $1.822,4 \text{ km}^2$. Secara administrasi, Kabupaten Wonogiri terbagi menjadi 25 kecamatan yang terdiri dari 297 desa/kelurahan. Kabupaten Wonogiri berbatasan langsung dengan Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Magetan di sisi utara, pada sisi selatan berbatasan dengan Kabupaten Pacitan, kemudian di sisi timur berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo dan pada sisi barat berbatasan dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Kabupaten Karanganyar

Kabupaten Karanganyar secara astronomis terletak di antara $110^{\circ} 40' - 110^{\circ} 70'$ Bujur Timur dan $70^{\circ} 28' - 70^{\circ} 46'$ Lintang Selatan. Kabupaten

Karanganyar memiliki luas wilayah 800,2 km². Secara administrasi, Kabupaten Karanganyar terbagi menjadi 17 kecamatan yang terdiri dari 177 desa/kelurahan. Kabupaten Karanganyar berbatasan dengan Sragen di sisi utara, pada sisi selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri, kemudian di sisi timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur, dan pada sisi barat berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Boyolali dan Kota Surakarta.

7. Kabupaten Sragen

Kabupaten Sragen terletak di antara 7° 15' – 70° 30' Lintang Selatan dan 110° 45' – 110° 10' Bujur Timur. Kabupaten Sragen memiliki luas wilayah 941,55 km². Secara administrasi, Kabupaten Sragen terbagi menjadi 20 kecamatan yang terdiri 208 desa/kelurahan. Kabupaten Sragen berbatasan langsung dengan Kabupaten Grobogan di sisi utara, pada sisi selatan berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar, kemudian pada sisi timur berbatasan dengan Kabupaten Ngawi, dan berbatasan dengan Kabupaten Boyolali di sisi barat.

B. Keadaan Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten/Kota eks Karesidenan Surakarta pada 2017 berjumlah 6.247.861 jiwa. Kabupaten Klaten memiliki presentasi distribusi penduduk tertinggi di wilayah eks Karesidenan Surakarta dengan angka 18,68% atau 1.167.400 jiwa. Wilayah di eks Karesidenan Surakarta yang memiliki presentasi distribusi penduduk terendah adalah Kota Surakarta dengan

angka 8,2 % atau 516.100 jiwa. Berikut ini keadaan demografi di wilayah eks Karesidenan Surakarta tahun 2017.

TABEL 4.1
Keadaan Demografi Kabupaten/Kota eks Karesidenan Surakarta Tahun 2017

NO	Kabupaten/Kota	Populasi (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	Presentasi distribusi (%)
1.	Kota Surakarta	516.100	11.718	8.26
2.	Kabupaten Klaten	1.167.400	1.781	18.68
3.	Kabupaten Boyolali	974.579	960	15.59
4.	Kabupaten Sukoharjo	878.370	1.883	14.05
5.	Kabupaten Wonogiri	954.700	524	15.28
6.	Kabupaten Karanganyar	871.590	1.264	13.95
7.	Kabupaten Sragen	885.122	936	14.16

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

Wilayah eks Karesidenan Surakarta dengan tingkat kepadatan tertinggi adalah Kota Surakarta dengan tingkat kepadatan 11.718 jiwa/km², sedangkan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk terendah adalah Kabupaten Wonogiri dengan tingkat kepadatan 524 jiwa/km².

C. Gambaran Umum Variabel Penelitian

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang merupakan hasil dari pungutan dari masyarakat dalam bentuk pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo 2002). Menurut UU NO. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli

Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator keberhasilan Pemerintah Daerah menyelenggarakan tugasnya sebagai wujud dari pelaksanaan otonomi daerah. Kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan cerminan seberapa besar tingkat kemandirian suatu daerah otonom. Suatu daerah dapat dikatakan berhasil melaksanakan otonomi jika kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD tinggi sehingga mampu membiayai pengeluaran daerah. Berikut ini pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten/Kota eks Karesidenan Surakarta.

TABEL 4.2
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota eks Karesidenan Surakarta
Tahun 2011-2017 (juta rupiah)

Tahun	Kota Surakarta	Kab. Klaten	Kab. Boyolali	Kab. Sukoharjo	Kab. Wonogiri	Kab. Karanganyar	Kab. Sragen
2011	181.097	72.294	96.489	96.167	77.142	104.081	94.519
2012	231.672	84.756	127.725	164.954	100.037	116.707	127.696
2013	298.401	115.454	160.753	192.972	111.593	161.724	146.722
2014	335.660	177.922	227.516.5	264.814	174.408	215.299	254.392
2015	372.798	190.623	260.634	313.948	211.209	255.443	267.712
2016	425.503	224.198	292.310	363.163	218.605	301.308	297.176
2017	527.544	371.718	388.015	464.567	333.840	412.876	404.556
Rata-rata	338.954	176.709	221.920	265.798	175.262	223.920	227.539

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2012 - 2018

Tabel 4.2 adalah realisasi pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten/kota eks Karesidenan Surakarta tahun 2011 – 2017. Berdasarkan tabel di atas rata-rata tertinggi realisasi pendapatan asli daerah adalah PAD Kota Surakarta

dengan rata-rata 338.954 juta rupiah per tahun, selanjutnya diikuti Kabupaten Sukoharjo dengan rata-rata 265.798 juta rupiah per tahun, kemudian diikuti Kabupaten Sragen dengan rata-rata realisasi PAD sebesar 227.539 juta rupiah per tahun, kemudian Kabupaten Karanganyar dengan rata-rata 223.920 juta rupiah per tahun, disusul Kabupaten Boyolali dengan rata-rata per tahun sebesar 221.920 juta, diurutan dua terendah adalah Kabupaten Klaten dengan rata-rata 176.709 juta rupiah per tahun diikuti Kabupaten Wonogiri dengan rata-rata 175.262 juta rupiah per tahun.

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

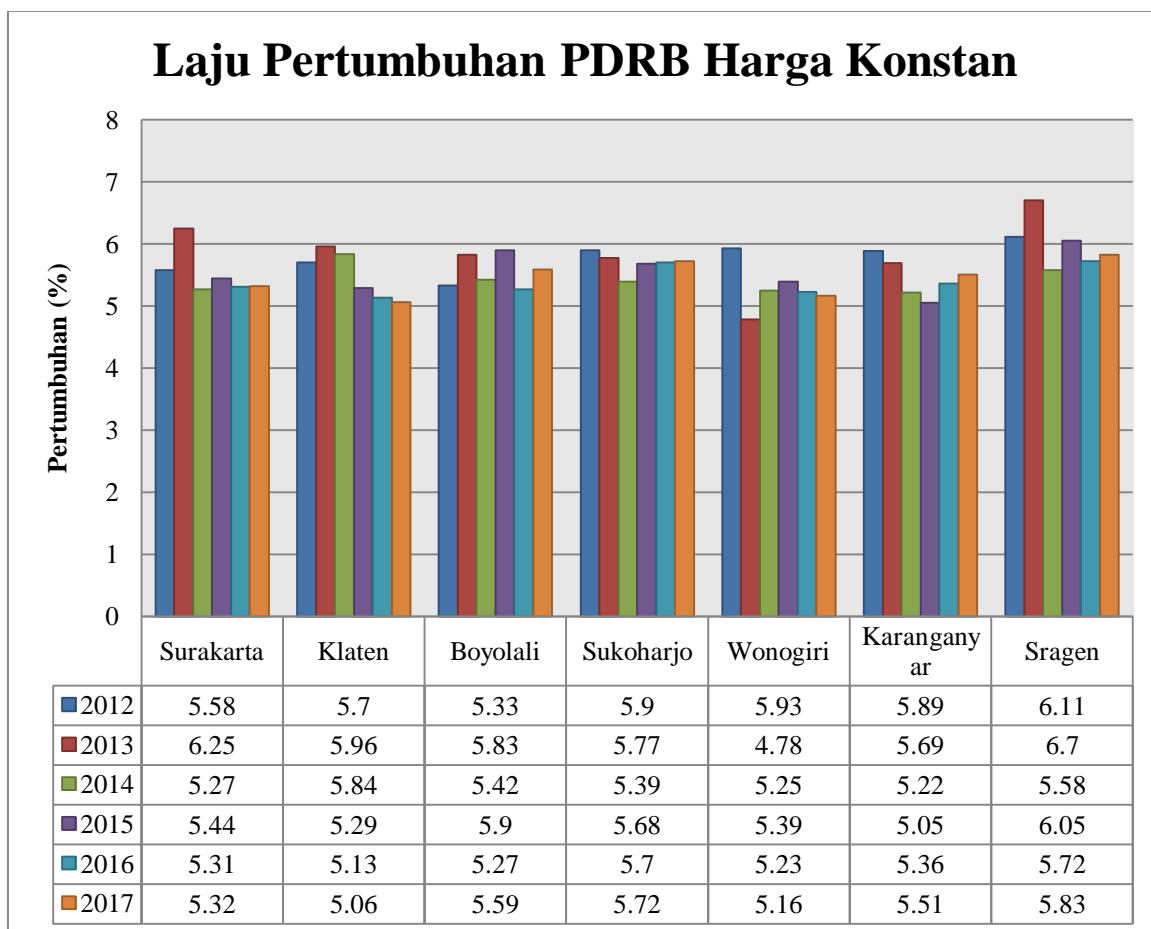
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah perolehan nilai tambah dari seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu pada periode waktu tertentu. PDRB berdasarkan cara perhitungannya dibagi menjadi dua jenis, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. Cara perhitungan jenis PDRB atas dasar harga berjalan berdasarkan harga barang dan harga jasa tertentu, sedangkan cara perhitungan jenis PDRB atas dasar harga konstan berdasarkan harga pada suatu tahun tertentu biasanya disebut tahun dasar. Berikut ini PDRB berdasarkan harga konstan kabupaten/kota eks Karesidenan Surakarta.

TABEL 4.3
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Konstan Kabupaten/Kota Eks
Karesidenan Surakarta Tahun 2011-2017 (juta rupiah)

Tahun	Kota Surakarta	Kab. Klaten	Kab. Boyolali	Kab. Sukoharjo	Kab. Wonogiri	Kab. Karanganyar	Kab. Sragen
2011	22.848.439	18.071.351	14.592.026	17.319.639	13.786.711	17.205.064	16.870.231
2012	24.123.782	19.102.403	15.369.974	18.342.247	146.05.088	18.219.457	17.902.105
2013	25.631.681	20.241.429	16.266.499	19.401.889	15.303.280	19.256.516	19.102.182
2014	26.984.359	21.424.522	17.148.351	20.449.010	16.107.795	20.262.444	20.169.825
2015	28.453.494	22.558.976	18.160.984	21.612.078	16.977.199	21.286.287	21.390.871
2016	29.966.373	23.717.931	19.118.756	22.845.983	17.865.345	22.428.804	22.614.622
2017	31.562.980	24.920.302	20.188.700	24.152.940	18.788.400	23.665.950	23.933.250
Rata-rata	27.081.587	21.433.845	17.263.613	20.589.112	16.204.831	20.332.075	20.283.298

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2012 - 2018

Tabel 4.3 adalah kondisi PDRB atas harga konstan Kabupaten/Kota eks Karesidenan Surakarta tahun 2011-2017. Berdasarkan tabel, rata-rata PDRB atas harga konstan tertinggi adalah PDRB Kota Surakarta dengan angka 27.081.587 juta per tahun, di urutan kedua adalah Kabupaten klaten dengan rata-rata 21.433.845 juta per tahun, selanjutnya disusul Kabupaten Sukoharjo dengan rata-rata per tahun 20.589.112 per tahun, di posisi empat ditempati Kabupaten Karanganyar dengan rata-rata 20.332.075 juta per tahun, selanjutnya Kabupaten Sragen dengan rata-rata 20.283.298 juta per tahun, di urutan dua terbawah adalah Kabupaten Boyolali dengan rata-rata PDRB harga konstan sebesar 17.263.613 juta per tahun dan yang terakhir adalah Kabupaten Wonogiri dengan rata-rata per tahun 16.204.831 juta.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013-2018

GAMBAR 4.1

Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2012-2017

Gambar 4.1 merupakan laju pertumbuhan PDRB harga konstan di kabupaten/kota eks Karesidenan Surakarta. Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa setiap tahunnya PDRB di kabupaten/kota mengalami pertumbuhan. Selama tahun 2012 sampai 2017 peningkatan PDRB tertinggi adalah PDRB Kota Surakarta pada tahun 2013 yaitu pertumbuhannya mencapai 6,25%. Peningkatan PDRB terendah terjadi di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2013 dengan laju pertumbuhan PDRB sebesar 4.78.

1. Jumlah Pasar Tradisional

Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, BUMN, BUMD, atau dapat terjadi kolaborasi dan kerjasama antara pihak-pihak tersebut dalam pembangunan serta pengelolaannya. Pada pasar tradisional terdapat banyak penjual yang menempati kios, los, toko, atau tenda sebagai tempat menjajakan barang-barang kebutuhan masyarakat. Dalam pasar tradisional, kebanyakan pedagang yang berjualan adalah pedagang kecil, pedagang menengah, swadaya masyarakat, koperasi, dan unit-unit usaha berskala kecil/ menengah. Pasar tradisional merupakan tempat atau wadah kegiatan jual-beli antara penjual dengan pembeli dengan terjadi interaksi secara langsung diantara keduanya sehingga terdapat interaksi tawar-menawar. Biasanya dalam pasar tradisional kegiatan jual-beli dalam bentuk eceran atau kecil dalam waktu sementara atau tetap dengan tingkat pelayanan yang terbatas.

TABEL 4.4

Jumlah Pasar Tradisional di Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Surakarta Tahun 2011 – 2017 (unit)

Tahun	Kota Surakarta	Kab. Klaten	Kab. Boyolali	Kab. Sukoharjo	Kab. Wonogiri	Kab. Karanganyar	Kab. Sragen
2011	43	47	43	38	28	42	43
2012	43	47	43	39	28	42	43
2013	43	48	44	39	28	45	44
2014	43	48	45	39	28	46	45
2015	43	49	45	39	29	47	46
2016	44	49	45	40	29	47	46
2017	44	49	46	40	30	47	46

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2012 - 2018

Tabel 4.4 menunjukkan jumlah pasar tradisional yang dimiliki dan dikelola pemerintah daerah di kabupaten/kota eks Karesidenan Surakarta dari tahun 2011 – 2017. Dapat dilihat jika jumlah pasar tradisional di kabupaten/kota eks Karesidenan Surakarta antar daeran memiliki jumlah yang tidak jauh beda. Kabupaten Klaten memiliki 49 unit pasar tradisional, Kabupaten Karanganyar memiliki 47 unit pasar tradisional, kemudian Boyolali dan Kabupaten Sragen memiliki jumlah pasar tradisional yang sama yaitu 46 unit. Kota Surakarta memiliki 44 unit pasar tradisional, kemudian disusul Kabupaten Sukoharjo dengan 40 unit dan daerah yang memiliki pasar tradisional paling sedikit yaitu Kabupaten Wonogiri dengan 30 unit.

2. Jumlah Industri

Industri adalah kumpulan perusahaan sejenis (Djojodipuro 1994). Perusahaan merupakan unit produksi yang melakukan kegiatan pada bidang tertentu. Bidang tertentu yang dimaksud adalah bidang pertanian, pengolahan, dan jasa. Secara sempit industri mempunyai pengertian kumpulan perusahaan yang melakukan kegiatan produksi sehingga menghasilkan produk sejenis dengan bahan baku yang digunakan, proses mempunyai satu kesamaan.

Pengertian industri menurut Badan Pusat Statistik adalah suatu unit/kesatuan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha

tersebut. Berikut ini perkembangan jumlah industri besar di kabupaten/kota eks Karesidenan Surakarta.

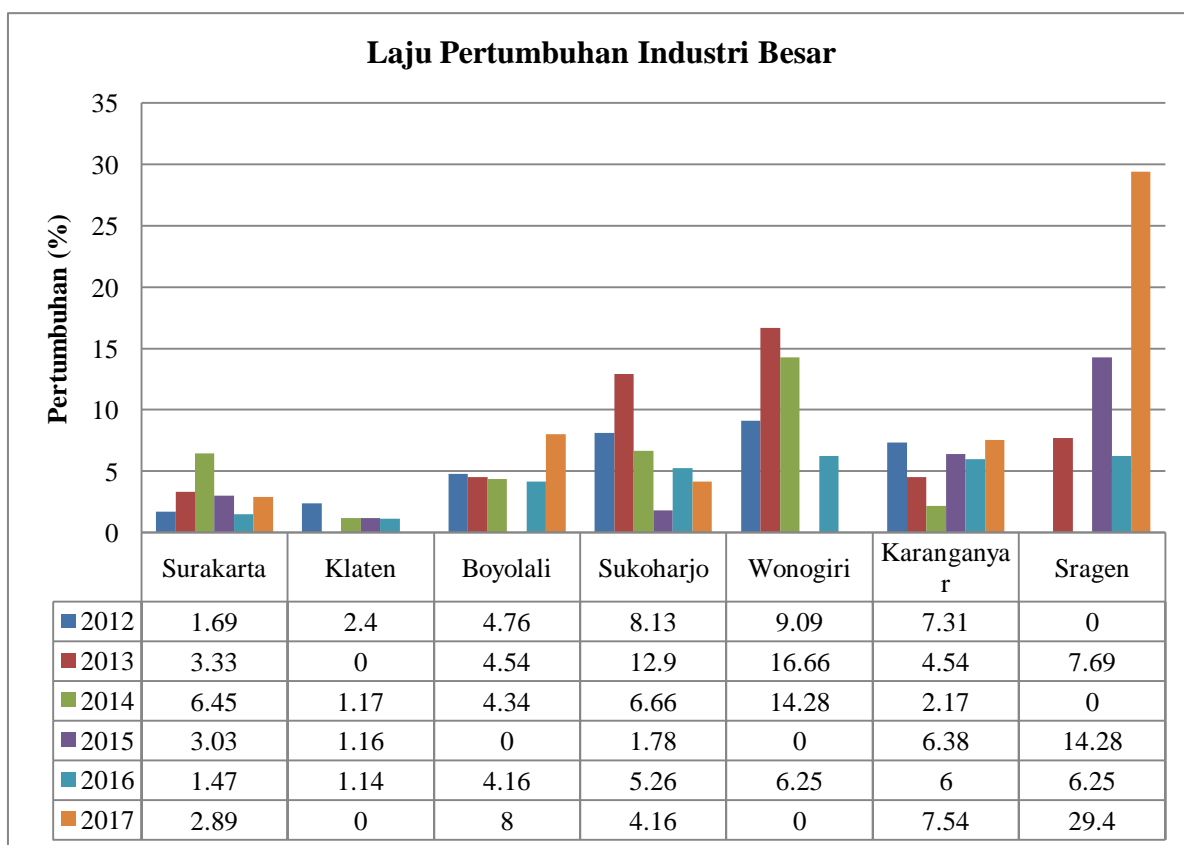
TABEL 4.5
Jumlah Industri Besar di Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Surakarta Tahun 2011 – 2017 (unit)

Tahun	Kota Surakarta	Kab. Klaten	Kab. Boyolali	Kab. Sukoharjo	Kab. Wonogiri	Kab. Karanganyar	Kab. Sragen
2011	59	83	21	86	11	41	13
2012	60	85	22	93	12	44	13
2013	62	85	23	105	14	46	14
2014	66	86	24	112	16	47	14
2015	68	87	24	114	16	50	16
2016	69	88	25	120	17	53	17
2017	71	88	27	125	17	57	22

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2012 - 2018

Perkembangan industri besar dan sedang di kabupaten/kota eks Karesidenan Surakarta dari tahun 2011 – 2017 rata-rata berdasarkan data BPS mengalami peningkatan setiap tahunnya. Industri besar berdasarkan pengelompokan BPS adalah industri dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 100 pekerja. Menurut data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2017 Kabupaten Sukoharjo berada di urutan pertama kabupaten dengan jumlah industri besar di wilayah eks Karesidenan Surakarta dengan jumlah industri sebanyak 125 unit, kemudian disusul Kabupaten Klaten dengan jumlah industri besar sebanyak 88 unit, di urutan ketiga adalah Kota Surakarta dengan jumlah 71 unit, disusul Kabupaten Karanganyar dengan jumlah industri besar sebanyak 57 unit, pada urutan kelima jumlah industri besar adalah Kabupaten Boyolali dengan jumlah 27 unit, Kabupaten Sragen menempati urutan kedua dari bawah dengan jumlah 22 unit, sedangkan di urutan paling bawah atau kabupaten yang

memiliki jumlah industri besar paling sedikit di wilayah eks Karesidenan Surakarta adalah Kabupaten Wonogiri dengan jumlah 17 unit usaha.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013-2018

GAMBAR 4.2

Laju Pertumbuhan Industri Besar

Gambar 4.2 menunjukkan laju perkembangan jumlah industri besar di kabupaten/kota eks Karesidenan Surakarta antara tahun 2012 sampai 2017. Berdasarkan gambar di atas perkembangan industri besar di kabupaten/kota eks Karesidenan Surakarta mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pertumbuhan tertinggi industri besar terjadi di Kabupaten Sragen pada tahun 2017 sebesar 29.4 %. Pertumbuhan menunjukkan angka yang tinggi, tetapi secara jumlah

masih relatif kecil di bandikan daerah lain. Kondisi pertumbuhan industri yang stagnan juga sering terjadi semisal pada tahun 2013, dan 2017 di Kabupaten Klaten tidak mengalami perkembangan, selanjutnya di Kabupaten Boyolali juga terjadi kondisi yang sama pada tahun 2015. Kondisi yang sama juga terjadi di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2015 dan 2017 perkembangannya 0%. Kondisi Stagnan dalam perkembangan industri besar juga terjadi pada tahun 2014 di Kabupaten Karanganyar dan di wilayah Kabupaten Sragen pada tahun 2012 dan 2014 juga mengalami kondisi yang sama.

3. Penanaman Modal Asing

Menurut UU NO.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, modal asing adalah modal yang dimiliki negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki pihak asing. Penanaman modal asing terdiri penanaman modal asing langsung (*Foreign Direct Investment*) yang meliputi aset-aset nyata berupa pembangunan pabrik-pabrik, barang modal, pembelian tanah untuk keperluan kegiatan produksi. Penanaman modal asing secara tidak langsung atau *portofolio investment* merupakan penanaman modal yang hanya melibatkan aset-aset finansial seperti saham dan obligasi (Salvatore 1997). Berikut ini perkembangan penanaman modal asing di kabupaten/kota eks Karesidenan Surakarta:

TABEL 4.6
Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten/Kota
Eks Karesidenan Surakarta Tahun 2011 – 2017 (juta rupiah)

Tahun	Kota Surakarta	Kab. Klaten	Kab. Boyolali	Kab. Sukoharjo	Kab. Wonogiri	Kab. Karanganyar	Kab. Sragen
2011	5.622	16.585	36.000	144.626	9.784	39.292	10.428
2012	48.505	29.223	15.675	184.745	10.434	12.358	53.930
2013	198.912	17.796	21.075	2.797.473	10.361	15.578	67.978
2014	160.911	38.440	609.772	1.719.096	110.542	80.487	69.477
2015	94.399	5.808	479.349	3.192.039	172.893	19.741	67.485
2016	147.123	85.624	248.997	2.159.555	81.468	46.743	41.000
2017	45.100	138.962	178.758	352.370	88.776	12.602	22.087
Rata-rata	100.082	47.491	227.089	1.507.129	69.180	32.400	47.484

Sumber : BPMPTSP Povinsi Jawa Tengah, 2012 - 2018

Perkembangan realisasi penanaman modal asing (PMA) di kabupaten/kota eks Karesidenan Surakarta antara tahun 2011 – 2017 mengalami naik turun atau fluktuatif setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah, rata-rata tertinggi realisasi penanaman modal asing per tahun adalah PMA di Kabupaten Sukoharjo dengan nilai investasi 1.507.129 juta, kemudian di urutan kedua ditempati Kabupaten Boyolali dengan rata-rata nilai investasi per tahun sebesar 227.089 juta, disusul Kota Surakarta dengan rata-rata 100.082 juta per tahun, pada urutan keempat ditempati Kabupaten Wonogiri dengan rata-rata penanaman modal sebesar 69.180 juta per tahun, diikuti Kabupaten Klaten dengan rata-rata realisasi PMA sebesar 47.491 juta per tahun, Kabupaten Sragen memiliki rerataan penanaman modal asing hampir sama dengan Kabupaten Klaten dengan rata-rata 47.484 juta per tahun, pada urutan terbawah rata-rata penanaman modal asing dalam rentang waktu

antara 2011 – 2017 di wilayah eks Karesidenan Surakarta adalah Kabupaten Karanganyar dengan rerataan sebesar 32.400 juta per tahun.

